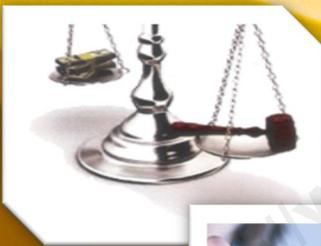


LAPORAN RINGKAS  
SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI (SPAK)  
2012

(INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI DAN INDIKATOR TUNGGAL)



BAPPENAS

Kerjasama  
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional  
dengan  
Badan Pusat Statistik





# **LAPORAN RINGKAS**

## **SURVEI PERILAKU ANTIKORUPSI 2012**

### **Indeks Perilaku Antikorupsi dan Indikator Tunggal**

Nomor Publikasi : 04330.1301

Ukuran Buku : 16 x 24 cm

Jumlah Halaman : xv + 36

Naskah:

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Penyunting :

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Gambar Kulit:

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya



## KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, baik yang berupa pencegahan maupun pemberantasan. Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka menengah tahun 2012-2014 dan jangka panjang tahun 2012-2025. Visi dan Misi Stranas PPK tersebut diturunkan ke dalam enam strategi, yakni: (1) melaksanakan upaya-upaya pencegahan; (2) melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum; (3) melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain; (4) melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor; (5) meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi; dan (6) meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

Presiden RI menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) secara eksplisit untuk mengukur indikator pada strategi 5 yaitu meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi. Strategi kelima ini dianggap penting karena salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi patut diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan dukungan data hasil survei, termasuk publikasi yang dapat memberikan gambaran tentang perilaku anti korupsi. Hasil survei diharapkan dapat menjadi *baseline* yang memberikan peta permasalahan dan petunjuk arah bagi penyusunan program transformasi budaya dari yang permisif ke anti korupsi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPS bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2012.

Semoga laporan hasil survei ini bermanfaat bagi pemerintah, khususnya untuk menyusun perencanaan kebijakan meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai kita semua.

Jakarta, Januari 2012  
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin, M.Sc



## KATA PENGANTAR MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Upaya berkesinambungan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin masif dan sistematis. Diantara langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 (Stranas PPK yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012. Sebagai tindak lanjut dari itu, Bappenas bekerja sama dengan BPS menyelenggarakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari salah satu strategi yang terdapat di dalamnya yaitu Strategi 5 (lima) Stranas PPK: Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi.

Dilaksanakannya SPAK merupakan langkah yang sangat maju dan diapresiasi oleh banyak pihak. PBB melalui *The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyebutnya sebagai survei yang pertama dilakukan di dunia, karena metode yang dilakukan adalah mengembangkan alat ukur untuk mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia menurut keadaan Indonesia sendiri, bukan menggunakan instrumen yang dikembangkan di luar negeri. Karena itu, SPAK ini pada dasarnya merupakan survei yang dibangun atas fondasi kepemilikan nasional. Atas semua capaian ini, sebagai bangsa kita patut berbangga hati karena telah memiliki SPAK. Sinergi para pemangku kepentingan juga tercermin di dalam penyusunan SPAK. Selain pemerintah, unsur masyarakat seperti akademisi dan aktivis LSM, juga terlibat dalam penyusunan SPAK. Seluruh tim yang terlibat dalam kegiatan ini, baik dari BPS, UKP4, Setwapres, Bappenas, ICW, KPK, UNODC, maupun LSM pegiat antikorupsi, telah bekerja keras dalam mempersiapkan seluruh instrumen survei.

Dengan telah terbitnya laporan hasil SPAK 2012, atas nama Pemerintah saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas sumbangsih, kerja keras, dan upaya yang luar biasa dari semua pihak, utamanya yang tergabung dalam tim, juga pihak-pihak lain yang telah membantu penyusunan SPAK 2012. Saya berharap, hasil SPAK 2012 ini dapat memacu kita semua dalam menciptakan budaya *zero tolerance* terhadap korupsi. Kita semua juga berharap, melalui pengukuran SPAK ini masyarakat akan menjadi pelaku aktif bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga mampu mempengaruhi keputusan di lingkungannya.

Proses penyusunan SPAK 2012 yang menjadi bagian dari pelaksanaan Stranas PPK berikut strategi-strategi pendukung lainnya, akan menjadi pedoman dan acuan bagi setiap pengambilan keputusan oleh para pejabat publik dalam menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan cara itu, diharapkan pada akhirnya visi Stranas PPK yaitu: *"Terwujudnya Kehidupan yang Bersih dan Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas"* dapat terpenuhi. Dan lebih penting lagi, hal tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan

KATA PENGANTAR

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

nasional yang kita cita-citakan. Dengan demikian, berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara berkesinambungan, diharapkan dapat menjadikan Indonesia menjadi negara besar, berwibawa, dan bersih dari berbagai praktik korupsi.

Jakarta, Januari 2013  
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

  
Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, MA

<http://www.bps.go.id>

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Perpres No.55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), menugaskan BPS untuk melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2012. Survei ini dilakukan antara 1-31 Oktober 2012 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan sampel 10.000 rumah tangga (*response rates*: 89 persen).

Survei ini mengukur tingkat permisifitas masyarakat Indonesia terhadap perilaku korupsi. Data yang dihasilkan berupa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan indikator tunggal yang menggambarkan perilaku anti korupsi

### 1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2012

Berdasarkan penghitungan indeks komposit, IPAK Indonesia 2012 sebesar 3,55 dari skala 5. Variabel penyusun IPAK dipilih dari sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK 2012 menggunakan *explanatory factor analysis*.

Survei ini menghasilkan  
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2012  
sebesar 3,55

### 2. Indikator Tunggal SPAK 2012

#### 2.1. Pendapat Terhadap Kebiasaan Di Masyarakat

##### 2.1.1. Perilaku dalam Keluarga

- Sekitar 69 persen responden menyatakan bahwa perilaku istri yang menerima uang pemberian suami di luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar.
- Sekitar 73 persen responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku pegawai negeri yang bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi.
- Sekitar 80 persen responden menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku orang tua yang mengajak anaknya dalam kampanye PEMILU/PILKADA demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak.

***“Dengan kata lain, masih sekitar 32 persen istri yang menerima saja uang yang diberikan suami tanpa harus mempertanyakan asal usulnya”***

##### 2.2.2. Perilaku di Tingkat Komunitas

- Sekitar 31 persen responden berpendapat kurang wajar atau tidak wajar memberi uang/barang kepada tokoh adat/agama/masyarakat (sebagai sejenis upeti) ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian) sedangkan responden yang berpendapat kurang wajar

atau tidak wajar memberi kepada tokoh formal (Ketua RT/RW/Kades/Lurah) sekitar 53 persen.

- Sekitar 38 persen responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada tokoh informal (adat/agama/masyarakat, sebagai sejenis upeti) ketika menjelang hari raya keagamaan.

***“Dengan kata lain, lebih dari separuh responden menyatakan wajar saja untuk memberi sesuatu pada para tokoh informal atau tokoh masyarakat setempat (RT/RW/Kades) pada saat melaksanakan hajatan atau di hari raya keagamaan”***

### 2.2.3. Perilaku di Tingkat Publik

- Sekitar 53 persen responden menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri atau swasta demi mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan.
- Sekitar 81 persen menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang yang memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta.
- Sekitar 55 persen responden berpendapat kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang yang memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK).
- Sekitar 61 persen responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK.
- Sekitar 68 persen responden menyatakan bahwa perilaku memberi uang damai kepada polisi merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar.
- Sekitar 67 persen responden menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku petugas KUA meminta uang tambahan untuk transpor ke tempat acara akad nikah.
- Separuh lebih (64 persen) responden menilai bahwa guru mendapat jaminan (jatah) anaknya diterima masuk ke sekolah tempat dia mengajar merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar.
- Lebih dari tiga perempat responden yaitu sekitar 83 persen responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku guru yang meminta uang/barang ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor.
- Sekitar 73 persen responden menilai bahwa perilaku membagikan atau mengharapkan uang/barang pada pelaksanaan PILKADA/PEMILU merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar.

***“Walau sebagian responden menyatakan tidak mendukung upaya penyuaipan, pemerasan, dan nepostime tetapi masih besar persentase responden yang menyatakan tindakan tersebut sebagai sesuatu yang wajar”***

### 3. Pengalaman Responden dengan Layanan Publik

Institusi layanan publik yang ditanyakan dalam survei ini mencakup layanan yang dilakukan oleh pengurus RT/RW; petugas kantor desa/kelurahan; petugas polisi; petugas PLN; petugas rumah sakit/Puskesmas; guru/kepala sekolah; petugas lembaga peradilan; petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan petugas BPN.

- Responden yang berhubungan dengan 10 jenis layanan publik menyatakan pernah membayar melebihi ketentuan. Tiga persentase terbesar yaitu pada layanan oleh petugas polisi (sekitar 20 persen responden), petugas lembaga peradilan (sekitar 18 persen), dan petugas KUA (sekitar 17 persen).
- Pada jenis layanan ke masyarakat yang dilakukan oleh pengurus RT/RW, kantor desa/kelurahan, petugas PLN, dan petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagian besar pembayaran yang melebihi ketentuan tersebut dilakukan pada saat sesudah pelayanan.
- Pada jenis layanan oleh petugas polisi, petugas rumah sakit/Puskesmas dan guru/kepala sekolah sebagian besar pembayaran lebih tersebut dilakukan pada saat pelayanan. Namun, pada jenis layanan petugas peradilan, petugas KUA dan petugas BPN sebagian besar pembayaran dilakukan sebelum pelayanan.
- Sebagian besar responden yang menyatakan mengetahui bahwa mereka harus membayar lebih (karena diminta langsung oleh petugas) yaitu pada layanan polisi (sekitar 66 persen responden), guru/kepala sekolah (sekitar 60 persen), dinas kependudukan dan pencatatan sipil (sekitar 60 persen).
- Responden menyatakan bahwa tujuan memberikan uang melebihi ketentuan adalah demi mempercepat proses pengurusan, terutama di tiga jenis layanan: petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (70 persen), petugas polisi (65 persen), dan petugas BPN (53 persen).

### 4. Media Sosialisasi Anti Korupsi

- Sebagian besar (27 persen) responden menilai pemerintah merupakan sumber yang paling efektif (mudah diterima, dapat membawa hasil, berguna) dalam memberikan pengetahuan anti korupsi.
- Sekitar 67 persen responden menilai televisi merupakan jenis media yang paling efektif sebagai penyalur informasi dan pengetahuan anti korupsi.

***“Lebih dari dua pertiga responden menyatakan televisi sebagai media paling efektif penyalur informasi dan pengetahuan anti korupsi”***



**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK.....	iii
KATA PENGANTAR MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL .....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
I. PENDAHULUAN.....	1
II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI.....	3
1. Metodologi Survei.....	3
2. Metodologi Perhitungan Indeks .....	3
3. Konsep dan Definisi .....	4
III. PROFIL RESPONDEN.....	7
1. <i>Response Rate</i> Responden.....	7
2. Karakteristik Demografi Responden.....	7
3. Karakteristik Ekonomi Rumah Tangga Responden .....	8
IV. PERILAKU ANTI KORUPSI.....	11
1. Indeks Perilaku Anti Korupsi.....	11
2. Indikator Tunggal SPAK 2012 .....	12
2.1. Pendapat Terhadap Kebiasaan di Masyarakat .....	12
2.2. Pengalaman Berhubungan dengan Layanan Publik .....	19
2.3. Pengetahuan/Pemahaman Tentang Perilaku Korupsi .....	23
2.4. Media Sosialisasi Pengetahuan Anti Korupsi .....	23
LAMPIRAN .....	27



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.	Persentase responden menurut jenis kelamin.....	7
Gambar 2.	Kelompok umur (tahun) responden .....	7
Gambar 3.	Persentase responden menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan.....	8
Gambar 4.	Pengeluaran rumah tangga sebulan responden.....	8
Gambar 5.	Pendapat responden tentang sikap istri yang menerima uang pemberian suami di luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut.....	12
Gambar 6.	Pendapat responden tentang pegawai negeri yang bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi.....	13
Gambar 7.	Pendapat responden tentang perilaku orang tua yang mengajak anaknya dalam kampanye PEMILU/PILKADA demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak.....	13
Gambar 8.	Pendapat responden tentang seseorang yang mengetahui saudaranya mengambil uang orang tuanya tetapi tidak melaporkannya .....	14
Gambar 9.	Pendapat responden tentang perilaku seseorang yang memberi uang/barang kepada tokoh formal dan informal ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian).....	14
Gambar 10.	Pendapat responden tentang perilaku seseorang yang memberi uang/barang kepada tokoh formal dan informal ketika menjelang hari raya keagamaan .....	15
Gambar 11.	Pendapat responden tentang perilaku seseorang yang menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri/swasta.....	15
Gambar 12.	Pendapat responden tentang perilaku seseorang yang memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta.....	16
Gambar 13.	Pendapat responden tentang perilaku seseorang yang memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK) .....	16
Gambar 14.	Pendapat responden tentang perilaku seseorang yang memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK .....	17
Gambar 15.	Pendapat responden tentang perilaku seseorang yang memberi uang damai kepada polisi .....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 16. Pendapat responden tentang perilaku petugas KUA yang meminta uang tambahan untuk transpor ke tempat acara akad nikah.....18

Gambar 17. Pendapat responden tentang perilaku seseorang yang memberi kepada pihak sekolah agar anaknya diterima atau guru yang meminta uang/barang dari orang tua murid ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor .....18

Gambar 18. Pendapat responden tentang seseorang yang membagikan atau seseorang yang mengharapkan uang/barang pada pelaksanaan Pilkades/Pilkada/Pemilu.....19

Gambar 19. Persentase responden yang membayar melebihi ketentuan menurut waktu pembayaran dan jenis petugas pelayanan publik.....20

Gambar 20. Persentase responden yang membayar melebihi ketentuan menurut cara mengetahui bahwa harus membayar lebih dan jenis petugas pelayanan publik.....21

Gambar 21. Persentase responden yang membayar melebihi ketentuan menurut tujuan dan jenis layanan publik .....22

Gambar 22. Responden yang membayar melebihi ketentuan menurut dilaporkan/tidaknya dan jenis petugas pelayanan publik.....22

Gambar 23. Persentase responden menurut pengetahuan responden tentang perilaku tertentu di masyarakat sebagai perilaku korupsi atau bukan perilaku korupsi .....23

Gambar 24. Pendapat responden menurut informasi yang dinilai responden paling efektif dalam memberikan pengetahuan anti korupsi .....24

Gambar 25. Pendapat responden menurut jenis media yang dinilai responden paling efektif dalam memberikan pengetahuan anti korupsi .....24

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Kuesioner SPAK12.K.....27  
Lampiran 2 : Indeks Perilaku Anti Korupsi.....31  
Lampiran 3 : Foto-Foto Workshop Instruktur Nasional.....32  
Lampiran 4 : Foto-Foto Pencacahan.....34

<http://www.bps.go.id>



## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014.

Presiden RI menugaskan BPS secara eksplisit untuk mengukur indikator pada strategi 5 yaitu meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi. Strategi ini diukur dengan melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi. Strategi kelima ini dianggap penting karena salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi patut diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi.

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan sebuah survei yang dapat memberikan gambaran tentang pendapat-pendapat yang berkembang di masyarakat terkait dengan korupsi. Hasil survei diharapkan dapat menjadi *baseline* yang memberikan peta bagi penyusunan program-program yang dapat meningkatkan imunitas masyarakat terhadap praktek-praktek koruptif, dan peran aktif mereka dalam mendukung tercapainya kondisi tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) pada tanggal 1-31 Oktober 2012.

### Maksud dan Tujuan

Penyusunan publikasi ini secara umum dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai situasi dan kondisi perilaku anti korupsi masyarakat terkini dilihat dari pendapat, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi di Indonesia.

Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai sejauhmana budaya *zero tolerance* terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima STRANAS PPK yakni pendidikan dan budaya anti korupsi.



## II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI

### 1. Metodologi Survei

SPAK 2012 merupakan survei dengan pendekatan rumah tangga dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 170 Kabupaten/Kota dan di 33 provinsi. Jumlah sampel seluruhnya sebanyak 10.000 rumah tangga. Pengambilan sampel menggunakan *Multistages Two Phase Sampling*, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pertama, memilih sejumlah kabupaten/kota dengan metode *probability proportional to size* (PPS) sistematis *with replacement size* jumlah rumah tangga SP2010 menurut klasifikasi perkotaan dan pedesaan secara *independent*. Dengan metode ini kabupaten/kota terpilih ada yang terpilih untuk *urban* saja, *rural* saja, atau keduanya. Untuk kabupaten/kota terpilih lebih dari 1 kali akan memiliki alokasi sampel blok sensus lebih banyak.
2. Kedua, memilih sejumlah blok sensus dari blok sensus terpilih Susenas 2012 triwulan III di kabupaten terpilih dengan cara sistematis menurut daerah *urban* (perkotaan) dan *rural* (pedesaan).
3. Ketiga, dari sampel blok sensus susenas triwulan III terpilih dilakukan penarikan sampel rumah tangga berdasarkan hasil pemutakhiran sebanyak 10 rumah tangga. Penarikan sampel menggunakan nilai angka random pertama (R1) yang berbeda dengan R1 susenas.
4. Keempat, dari setiap rumah tangga terpilih selanjutnya dipilih 1 responden (kepala rumah tangga atau pasangannya) secara acak (menggunakan Tabel Kish).

### 2. Metodologi Perhitungan Indeks

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2012 adalah indikator komposit yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Bappenas. SPAK 2012 merupakan survei dengan pendekatan rumah tangga dilaksanakan antara 1-31 Oktober 2012 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan sampel 10.000 rumah tangga (response rates: 89 persen). SPAK 2012 mencakup tiga fenomena utama korupsi yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme.

IPAK 2012 merupakan *baseline*. Variabel penyusun IPAK dipilih dari sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK 2012 menggunakan *explanatory factor analysis*

IPAK disusun berdasarkan dua substansi utama yakni pendapat tentang kebiasaan terkait akar dan perilaku anti korupsi di masyarakat serta

pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.

Berikut adalah tahapan penghitungan IPAK :

- Pemilihan variabel analisis dan transformasi data (proses *recording data*).
- Pemilihan variabel penyusun indeks didasarkan pada hasil *Exploratory Factor Analysis (Principal Component Analysis)*.
- Penghitungan indeks komposit (Indeks Perilaku Anti Korupsi).

Penghitungan IPAK

1. Penghitungan Bobot Setiap Variabel

$$\text{Bobot (Bi)} = \frac{\text{Loading Factor}}{\text{Total Loading Factor dalam 1 Faktor}} \times \frac{\text{Total Variasi dalam 1 Faktor}}{1 \text{ Faktor}}$$

2. Penghitungan Bobot Terstandarisasi Setiap Variabel

$$\text{Bobot Terstandarisasi (bi)} = \frac{Bi}{\sum Bi}$$

3. Penghitungan IPAK

IPAK adalah rata-rata tertimbang dari seluruh jawaban pada variabel penyusun indeks dengan penimbang bobot terstandarisasi masing-masing.

$$\text{IPAK} = \frac{\sum bi Xi}{\sum bi}$$

$b_i$  : Bobot Terstandarisasi;  $X_i$  : Variabel

4. Transformasi indeks ke skala 5 (sesuai Perpres)

$$\text{Indeks (0-5)} = \frac{(5 * \text{Indeks}(1-4) - 5)}{3}$$

### 3. Konsep dan Definisi

Menurut Wertheim (1965) ada tiga fenomena utama yang tercakup dalam istilah korupsi pada negara-negara Asia Tenggara yaitu

- **Penyuapan (*bribery*)**, yakni apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.
- **Pemerasan (*extortion*)**, yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk

pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik.

- **Nepotisme (*nepotism*)** yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik.

### **Akar Kultural Korupsi**

- Adanya tradisi pemberian hadiah, oleh-oleh atau semacam itu kepada pejabat pemerintah. Tindakan seperti itu di Eropa atau Amerika Utara bisa dianggap korupsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh kawula kepada gustinya.
- Ikatan keluarga dan kesetiaan parokial di masyarakat ketimuran seperti Indonesia masih dipandang sangat penting. Kewajiban seseorang pertama-tama adalah memperhatikan saudara terdekat, kemudian trah atau sesama etniknya. Pada budaya semacam ini apabila ada seseorang yang mendatangi saudaranya yang pejabat untuk meminta perlakuan khusus sulit untuk ditolak. Penolakan bisa diartikan sebagai pengingkaran terhadap kewajiban tradisional, tetapi menuruti permintaan berarti mengingkari norma-norma hukum formal yang berlaku. Sehingga selalu terjadi konflik nilai, yaitu antara norma budaya atau norma hukum formal.

Hasil diskusi dengan *stakeholder* dan para ahli, definisi perilaku korupsi dan anti korupsi dalam SPAK 2012 :

**Perilaku korupsi** adalah “Tindakan meminta (pemerasan)/ memperoleh/memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau keistimewaan (*nepotisme*) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan/wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pribadi (personal, keluarga dekat, kawan dekat)”.

**Perilaku anti korupsi** adalah “tindakan menolak/tidak permisif terhadap segala perilaku baik yang secara langsung merupakan korupsi, maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan pelanggaran perilaku



### III. PROFIL RESPONDEN

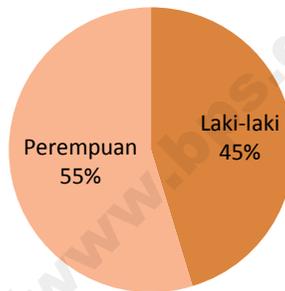
#### 1. Response Rate Responden

Dari keseluruhan target sampel yang berjumlah 10.000 responden, sebanyak 1.088 (10,88 persen) responden sampai batas akhir waktu pencacahan tidak berhasil dicacah dikarenakan berbagai hal mulai dari tidak dapat ditemui, tidak bersedia dicacah, dan sudah terlalu tua (jompo). Sehingga *response rate* responden SPAK 2012 ini secara keseluruhan mencapai sebesar 8.912 (89,12 persen).

#### 2. Karakteristik Demografi Responden

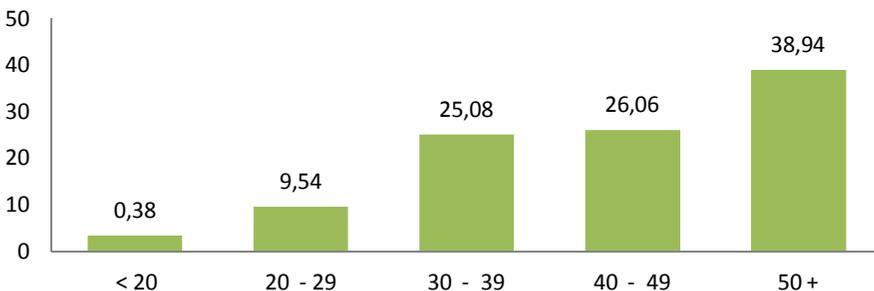
Sekitar 55 persen responden SPAK 2012 berjenis kelamin perempuan. Selebihnya sekitar 45 persen responden berjenis kelamin laki-laki.

**Gambar 1.**  
Persentase responden menurut jenis kelamin



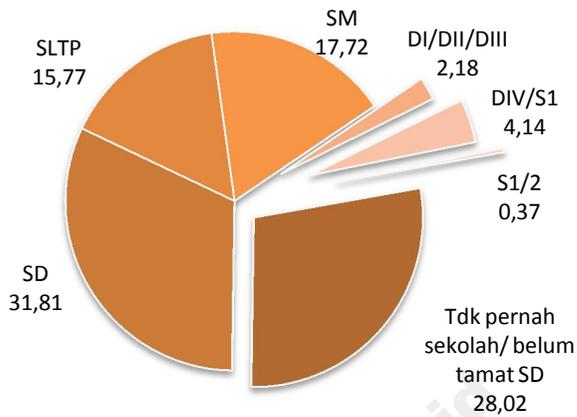
Sekitar 39 persen responden telah berumur di atas 50 tahun. Dan lebih dari separuh responden berusia antara 30–49 tahun yang mencapai sekitar 51 persen.

**Gambar 2.**  
Kelompok umur (tahun) responden



Sebagian besar responden berpendidikan tamat SD/Sederajat yaitu 32 persen. Mereka yang tidak pernah sekolah/tidak tamat SD (28 persen), tamat SLTA (18 persen), dan SLTP (16 persen). Komposisi responden yang tamat Diploma, S1, dan S2, sekitar 7 persen.

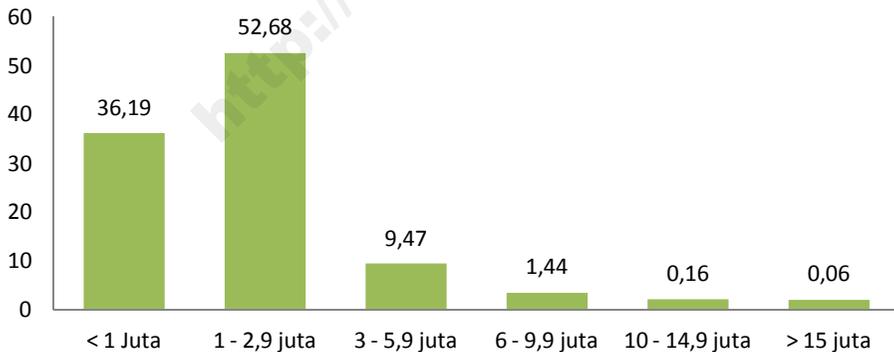
**Gambar 3.**  
**Persentase responden menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan**



### 3. Karakteristik Ekonomi Rumah Tangga Responden

Sekitar 53 persen memiliki rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan berkisar antara Rp 1 juta–Rp 2,9 juta. Responden yang memiliki pengeluaran rumah tangga di bawah Rp 1 juta sekitar 36 persen. Hanya sekitar 0,2 persen responden berasal dari rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran Rp 10 juta atau lebih.

**Gambar 4.**  
**Pengeluaran rumah tangga sebulan responden**



# HASIL SURVEI

<http://www.pps.go.id>



## IV. PERILAKU ANTI KORUPSI

### 1. Indeks Perilaku Anti Korupsi

Hasil SPAK 2012, salah satunya adalah Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2012 bertujuan menggambarkan dinamika perilaku masyarakat apakah berperilaku anti korupsi ataukah permisif terhadap korupsi. Selain itu juga mencerminkan intensitas dan kecenderungan perilaku (setiap individu memiliki besaran indeks). Serta menggambarkan kondisi perilaku masyarakat secara umum (indeks merupakan nilai rata-rata perilaku masyarakat)

IPAK 2012 merupakan *baseline*. Variabel yang signifikan secara statistik akan dipertahankan untuk survei pada tahun mendatang. IPAK kemudian dihitung secara rutin (tahunan) untuk menggambarkan perkembangan dinamika perilaku masyarakat.

Berdasarkan penghitungan indeks komposit diperoleh IPAK Indonesia 2012 sebesar 3,55 dari skala 5. Makna nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Variabel penyusun IPAK dipilih dengan menggunakan *exploratory factor analysis*

Survei ini menghasilkan  
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2012  
sebesar 3,55

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2012 sebesar 3,55 dari skala 5. Artinya masyarakat Indonesia cenderung anti korupsi. Catatan: nilai indeks 0–1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26–2,50 permisif, 2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi.

IPAK di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi (3,66) dibanding di wilayah perdesaan (3,46).

IPAK cenderung lebih tinggi pada responden usia kurang dari 60 tahun dibanding setelah usia 60 tahun ke atas. IPAK penduduk usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,57, usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,58 dan 60 tahun ke atas sebesar 3,45. Artinya semangat anti korupsi antara usia tua dan usia muda tidak berbeda secara signifikan.

Semakin tinggi pendidikan semakin tinggi IPAK. IPAK responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,47, SLTA sebesar 3,78 dan di atas SLTA sebesar 3,93. Pendidikan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi.

## 2. Indikator Tunggal SPAK 2012

### 2.1. Pendapat Terhadap Kebiasaan di Masyarakat

Bagaimana pendapat atau penilaian responden terhadap beberapa perilaku/kebiasaan yang diduga merupakan akar kultural berkembangnya perilaku korupsi. Perilaku yang dilihat adalah perilaku sehari-hari yang dekat dengan korupsi (*everyday corruption*). Dengan kata lain, semakin permisif pendapat terhadap perilaku korupsi dapat diduga menggambarkan perilaku anti korupsi individu yang semakin rendah dan sebaliknya. Bagian ini diukur dari tiga aspek (level) yaitu keluarga, komunitas, dan publik.

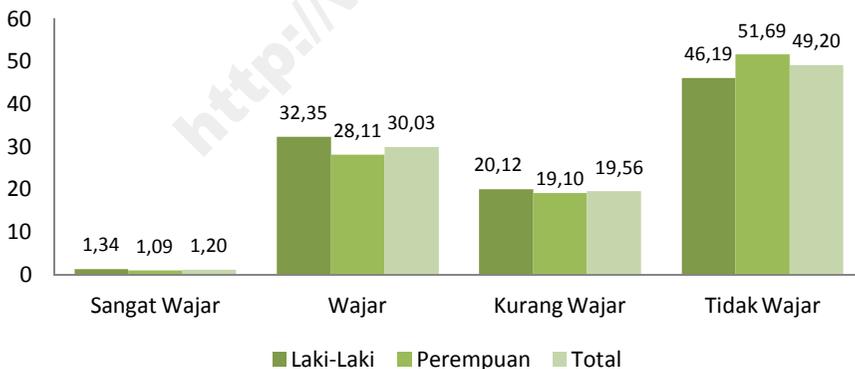
#### 2.1.1. Perilaku di Keluarga

Keluarga adalah level yang sangat penting dalam kehidupan sosial individu. Keluarga merupakan agen sosialisasi yang memiliki peranan yang sangat besar. *Berger* mendefinisikan sosialisasi adalah proses melalui mana seseorang belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat (Sunarto, 2004). Termasuk dalam pendidikan dan budaya anti korupsi posisi keluarga memiliki peran yang sangat penting. Dalam level rumah tangga terdiri dari empat variabel.

- Sekitar 69 persen responden menyatakan bahwa perilaku istri yang menerima uang pemberian suami di luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar. Persentase perempuan yang tidak permisif terkait perilaku tersebut lebih tinggi daripada laki-laki.

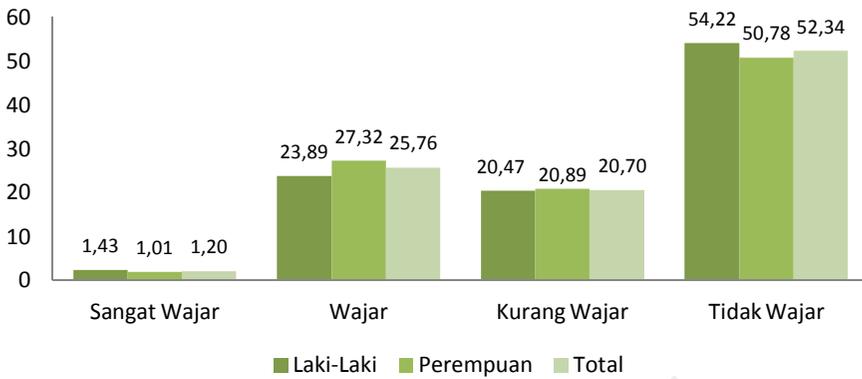
Gambar 5.

Pendapat responden tentang sikap istri yang menerima uang pemberian suami di luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut



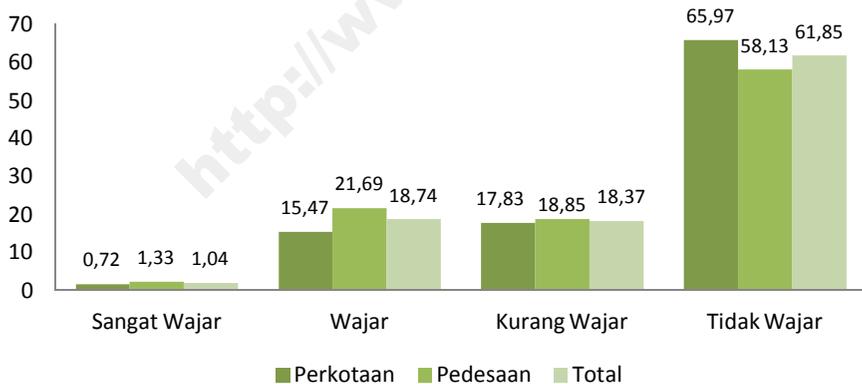
- Responden yang menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku pegawai negeri yang bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi mencapai sekitar 73 persen. Persentase responden yang tidak permisif (kurang wajar atau tidak wajar) lebih tinggi pada laki-laki daripada perempuan.

**Gambar 6.**  
**Pendapat responden tentang pegawai negeri yang bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi**



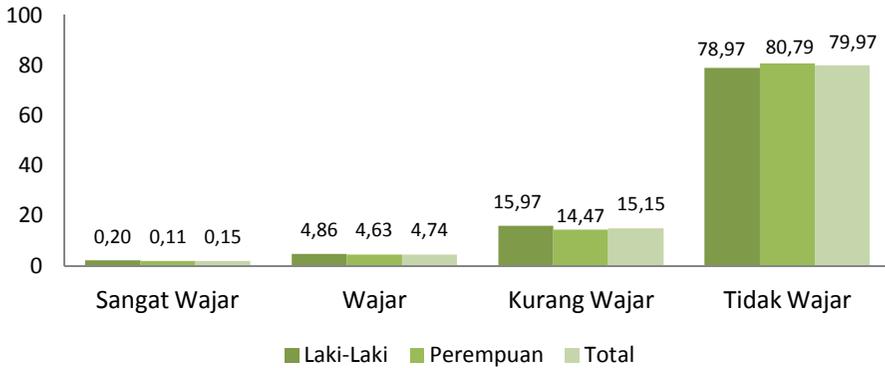
- Sekitar 80 persen responden menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku orang tua mengajak anaknya dalam kampanye PEMILU/PILKADA demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak. Responden di perkotaan lebih tinggi menyatakan kurang wajar atau tidak wajar dibanding responden perdesaan.

**Gambar 7.**  
**Pendapat responden tentang perilaku orang tua yang mengajak anaknya dalam kampanye PEMILU/PILKADA demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak**



- Sekitar 95 persen responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang yang mengetahui saudaranya mengambil uang orang tuanya dan tidak melaporkannya. Tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan antara responden laki-laki dan perempuan terkait perilaku tersebut.

**Gambar 8.**  
**Pendapat responden tentang seseorang yang mengetahui saudaranya mengambil uang orang tuanya tetapi tidak melaporkannya**

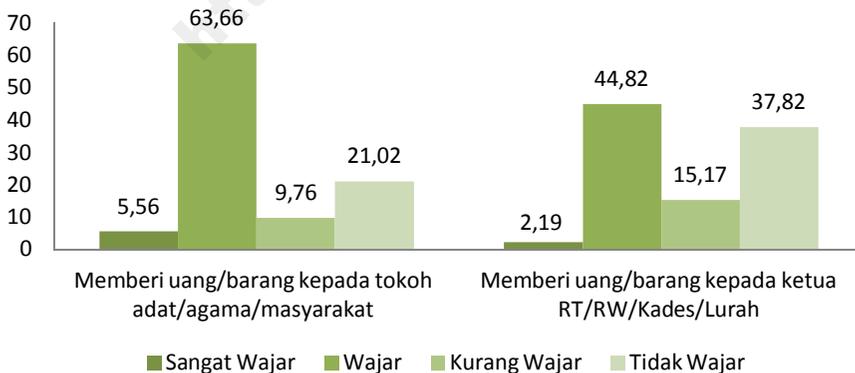


**2.1.2. Perilaku di Tingkat Komunitas**

Pada level komunitas terdiri dari empat variabel yang dikaji.

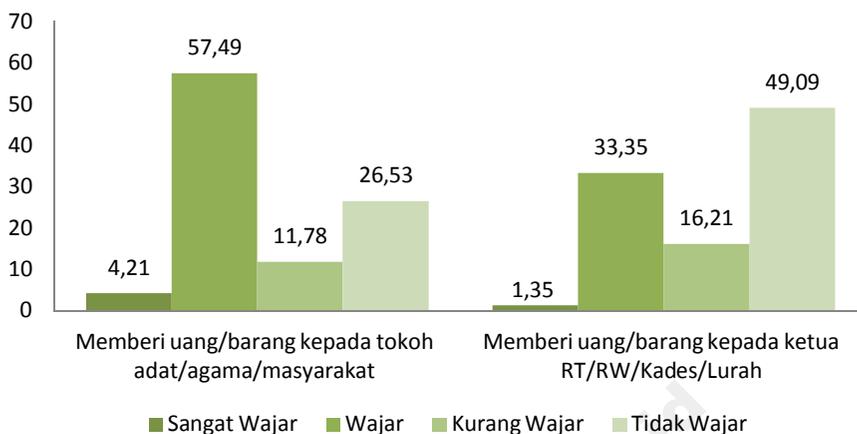
- Sekitar 31 persen responden menilai kurang wajar atau tidak wajar perilaku memberi uang/barang kepada tokoh informal (tokoh adat/agama/masyarakat). kepada tokoh formal (Ketua RT/RW/Kades/ Lurah), responden yang menilai kurang wajar atau tidak wajar sekitar 53 persen dari keseluruhan responden.

**Gambar 9.**  
**Pendapat responden tentang perilaku seseorang yang memberi uang/barang kepada tokoh formal dan informal ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian)**



- Lebih dari separuh responden yakni sekitar 65 persen menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada tokoh formal (Ketua RT/RW/Kepala desa/Lurah) ketika menjelang hari raya keagamaan. Sedangkan responden yang menilai kurang wajar atau tidak wajar kepada tokoh adat/agama/masyarakat hanya sekitar 38 persen.

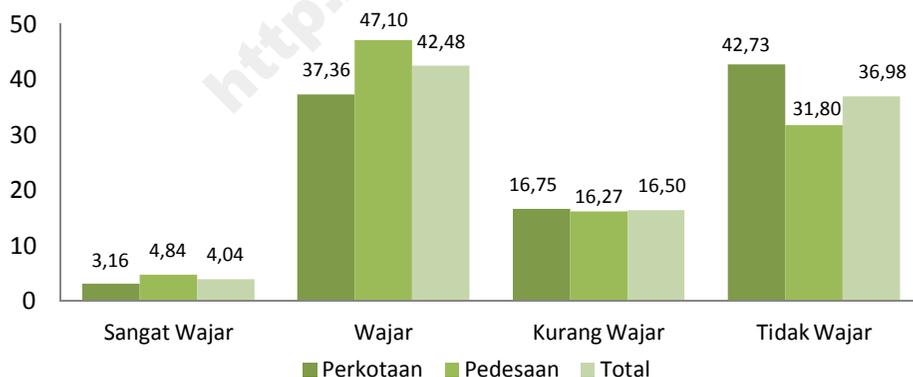
**Gambar 10.**  
**Pendapat responden tentang perilaku seseorang yang memberi uang/barang kepada tokoh formal dan informal ketika menjelang hari raya keagamaan**



### 2.1.3. Perilaku di Tingkat Publik

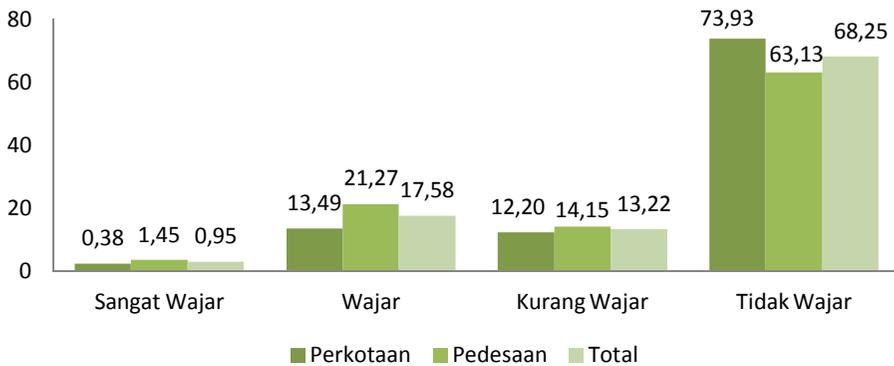
- Sekitar 53 persen responden menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang yang menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri atau swasta demi mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan. Pada perilaku tersebut, persentase responden yang tidak permisif di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan.

**Gambar 11.**  
**Pendapat responden tentang perilaku seseorang yang menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri/swasta**



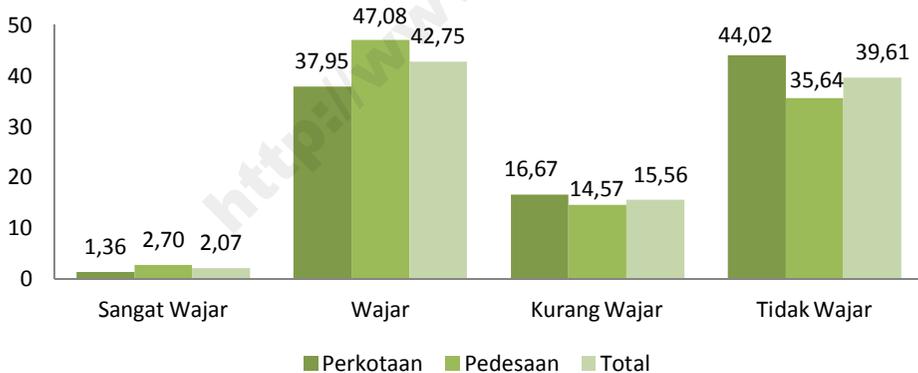
- Pendapat responden terhadap perilaku seseorang yang memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta sekitar 81 persen responden yang menilai perilaku tersebut sebagai hal yang kurang wajar atau tidak wajar. Lebih dari tiga perempat responden tidak permisif terhadap perilaku ini. Persentase responden yang tidak permisif di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di pedesaan.

**Gambar 12.**  
**Pendapat responden tentang perilaku seseorang yang memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta**



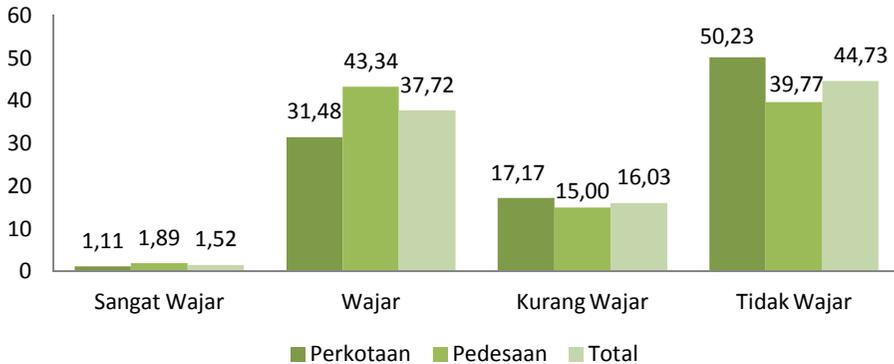
- Sekitar 55 persen responden berpendapat kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK). Persentase responden yang tidak permisif terhadap perilaku tersebut lebih tinggi di perkotaan daripada di pedesaan.

**Gambar 13.**  
**Pendapat responden tentang perilaku seseorang yang memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK)**



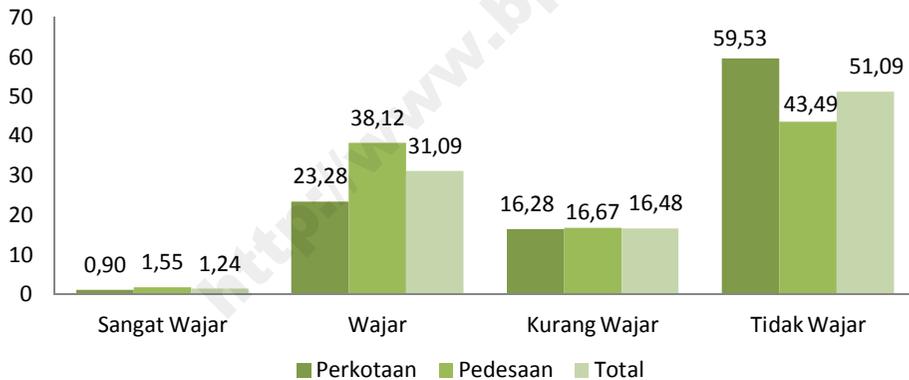
- Sekitar 61 persen responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK. Proporsi responden yang menilai kurang wajar dan tidak wajar lebih tinggi di daerah perkotaan daripada pedesaan.

**Gambar 14.**  
**Pendapat responden tentang perilaku seseorang yang memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK**



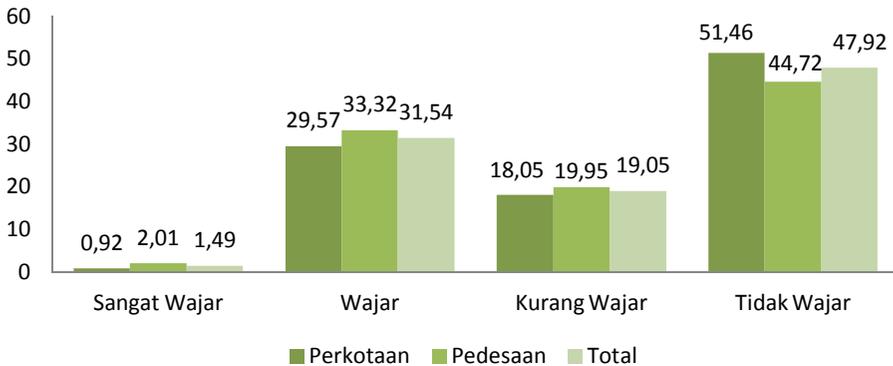
- Sekitar 68 persen responden menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang damai kepada polisi. Proporsi responden yang tidak permisif di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan.

**Gambar 15.**  
**Pendapat responden tentang perilaku seseorang yang memberi uang damai kepada polisi**



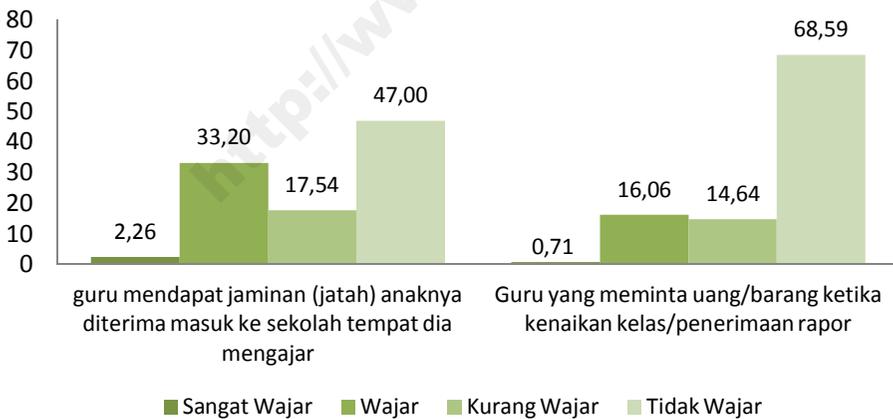
- Sekitar 67 persen responden menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku petugas KUA yang meminta uang tambahan untuk transpor ke tempat acara akad nikah. Ini artinya sekitar 33 persen responden permisif terhadap perilaku tersebut. Persentase responden yang menyatakan kurang wajar atau tidak wajar tidak terdapat perbedaan yang nyata di perkotaan dan di pedesaan.

**Gambar 16.**  
**Pendapat responden tentang perilaku petugas KUA yang meminta uang tambahan untuk transpor ke tempat acara akad nikah**



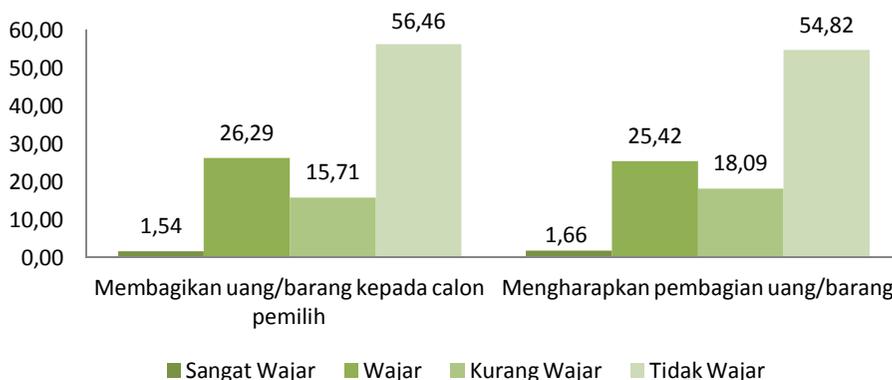
- Separuh lebih (64 persen) responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap guru mendapat jaminan (jatah) anaknya dapat diterima masuk ke sekolah tempat dia mengajar. Sekitar 83 persen responden yang menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap guru yang meminta uang/barang ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor.

**Gambar 17.**  
**Pendapat responden tentang perilaku guru yang mendapat jatah anaknya dapat diterima masuk ke sekolah tempat dia mengajar atau guru yang meminta uang/barang dari orang tua murid ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor**



- Sedikitnya sekitar 72 persen responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku membagikan atau mengharapkan uang/barang pada pelaksanaan pemilu/pilkada merupakan hal yang. Ini artinya lebih dari 70 persen responden tidak permisif terhadap politik uang.

**Gambar 18.**  
**Pendapat responden tentang seseorang yang membagikan atau seseorang yang mengharapkan uang/barang pada pelaksanaan Pilkades/Pilkada/Pemilu**



## 2.2. Pengalaman Berhubungan dengan Layanan Publik

Komitmen perilaku anti korupsi diuji ketika berbenturan dengan kepentingan. Salah satunya adalah ketika berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Bagaimana respon/tanggapan masyarakat ketika berhadapan dengan berbagai bentuk korupsi yang terjadi sehari-hari (*everyday corruption*). Pengalaman dalam berhubungan dengan pelayanan publik dalam bagian ini dilihat dari sepuluh petugas layanan publik dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.

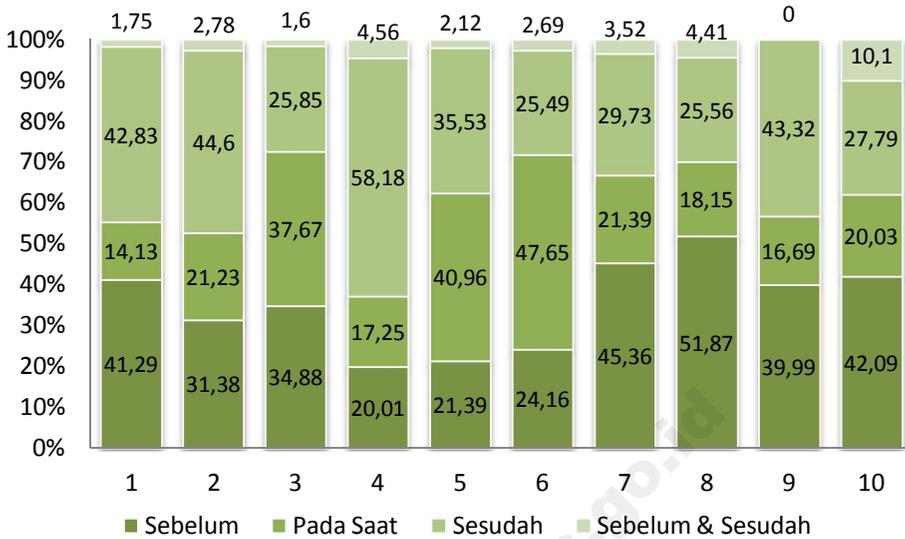
Institusi layanan publik yang ditanyakan dalam survei ini mencakup layanan yang dilakukan oleh pengurus RT/RW; petugas kantor desa/kelurahan; petugas polisi; petugas PLN; petugas rumah sakit/Puskesmas; guru/kepala sekolah; petugas lembaga peradilan; petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan petugas BPN.

Responden yang berhubungan dengan 10 jenis layanan publik menyatakan pernah membayar melebihi ketentuan. Tiga persentase terbesar yaitu pada layanan oleh petugas polisi (sekitar 20 persen responden), petugas lembaga peradilan (sekitar 18 persen), dan petugas KUA (sekitar 17 persen). Persentase terkecil responden yang pernah mengeluarkan uang/barang melebihi ketentuan terdapat pada layanan petugas rumah sakit/puskesmas (sekitar 3 persen) dan layanan guru/kepala sekolah (sekitar 7 persen).

Pada jenis layanan ke masyarakat yang dilakukan oleh pengurus RT/RW, kantor desa/kelurahan, petugas PLN, dan petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagian besar pembayaran yang melebihi ketentuan dilakukan pada saat sesudah pelayanan.

Pada jenis layanan oleh petugas polisi, petugas rumah sakit/Puskesmas dan guru/kepala sekolah sebagian besar pembayaran lebih tersebut dilakukan pada saat pelayanan. Namun, pada jenis layanan petugas peradilan, petugas KUA dan petugas BPN sebagian besar pembayaran dilakukan sebelum pelayanan.

**Gambar 19.**  
**Persentase responden yang membayar melebihi ketentuan menurut waktu pembayaran dan jenis petugas pelayanan publik**

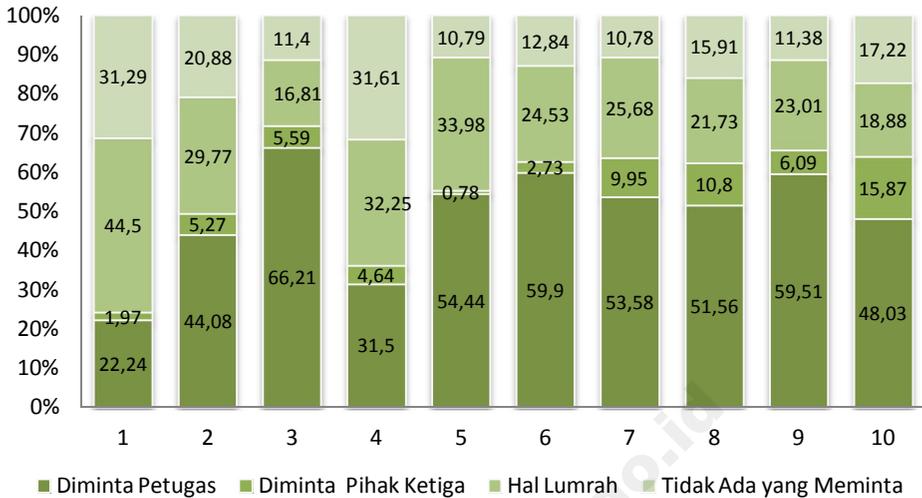


- 1. Pengurus RT/RW
- 2. Petugas Kantor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan
- 3. Petugas Polisi
- 4. Petugas PLN
- 5. Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas
- 6. Guru/Kepala Sekolah
- 7. Petugas Lembaga Peradilan
- 8. Petugas KUA
- 9. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 10. Petugas BPN

Dari sepuluh pelayan publik yang ditanyakan, sebagian besar responden menyatakan mengetahui harus mengeluarkan uang/barang melebihi ketentuan karena diminta langsung oleh petugas. Responden yang menyatakan demikian terdapat pada layanan polisi (sekitar 66 persen responden), guru/kepala sekolah (sekitar 60 persen), dinas kependudukan dan pencatatan sipil (sekitar 60 persen), petugas rumah sakit/puskesmas (sekitar sekitar 54 persen), petugas lembaga peradilan (sekitar 54 persen), petugas KUA (sekitar 52 persen), petugas BPN (sekitar 48 persen) dan petugas kantor desa/kelurahan (sekitar 44 persen).

Sekitar 76 persen responden mengeluarkan uang/barang melebihi ketentuan dilakukan karena menganggap sebagai hal lumrah atau tidak ada yang meminta, persentase terbesar terdapat pada layanan pengurus RT/RW dan petugas PLN.

**Gambar 20.**  
**Persentase responden yang membayar melebihi ketentuan menurut cara mengetahui bahwa harus membayar lebih dan jenis petugas pelayanan publik**



- |   |  |
|---|--|
| 2. Pengurus RT/RW                               | 6. Guru/Kepala Sekolah                             |
| 2. Petugas Kantor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan | 7. Petugas Lembaga Peradilan                       |
| 3. Petugas Polisi                               | 8. Petugas KUA                                     |
| 4. Petugas PLN                                  | 9. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5. Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas            | 10. Petugas BPN                                    |

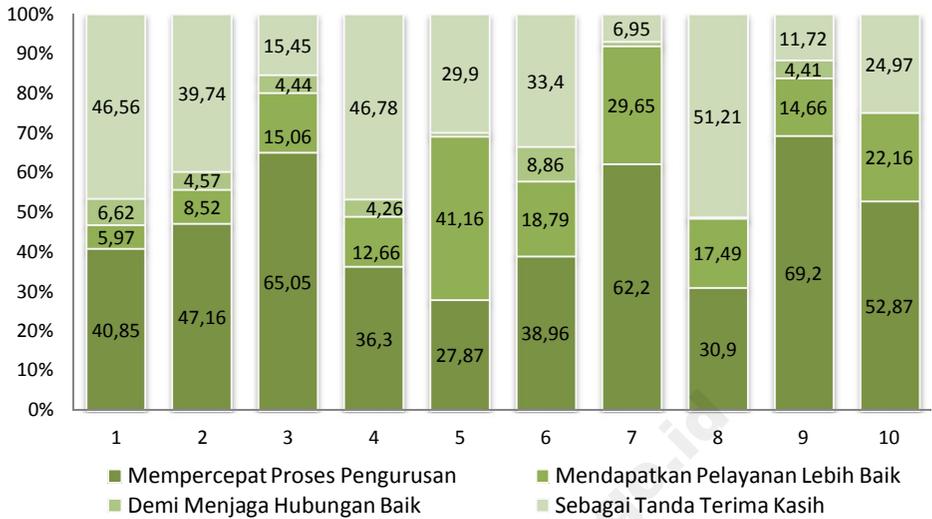
Responden menyatakan bahwa tujuan memberikan uang melebihi ketentuan adalah demi mempercepat proses pengurusan, terutama di tiga jenis layanan: petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (70 persen responden), petugas polisi (65 persen), dan petugas BPN (53 persen).

Sedangkan persentase terbesar responden yang membayar melebihi ketentuan karena sebagai tanda terima kasih terdapat pada layanan petugas KUA (51 persen), petugas PLN (47 persen) dan pengurus RT/RW (47 persen)

Salah satu aspek dalam melihat tingkat permisif individu terhadap perilaku korupsi adalah kemauan individu untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satunya adalah dengan melaporkan apabila ia mengalami peristiwa korupsi ketika berhubungan dengan layanan publik.

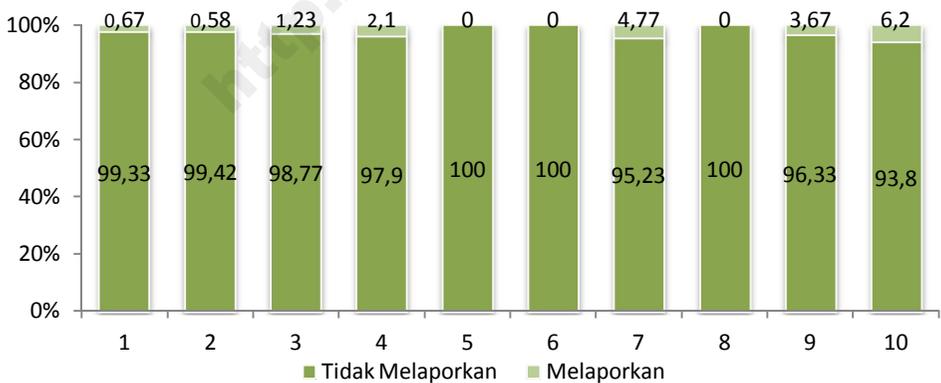
Sebagian besar responden (lebih dari 93 persen) tidak melaporkan ketika diharuskan mengeluarkan uang/barang melebihi ketentuan ketentuan pada seluruh jenis layanan publik.

**Gambar 21.**  
**Persentase responden yang membayar melebihi ketentuan menurut tujuan dan jenis layanan publik**



- |   |  |
|---|--|
| 1. Pengurus RT/RW                               | 6. Guru/Kepala Sekolah                             |
| 2. Petugas Kantor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan | 7. Petugas Lembaga Peradilan                       |
| 3. Petugas Polisi                               | 8. Petugas KUA                                     |
| 4. Petugas PLN                                  | 9. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5. Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas            | 10. Petugas BPN                                    |

**Gambar 22.**  
**Responden yang membayar melebihi ketentuan menurut dilaporkan/tidaknya dan jenis petugas pelayanan publik**



- |   |  |
|---|--|
| 1. Pengurus RT/RW                               | 6. Guru/Kepala Sekolah                             |
| 2. Petugas Kantor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan | 7. Petugas Lembaga Peradilan                       |
| 3. Petugas Polisi                               | 8. Petugas KUA                                     |
| 4. Petugas PLN                                  | 9. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5. Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas            | 10. Petugas BPN                                    |

### 2.3. Pengetahuan/Pemahaman Tentang Perilaku Korupsi

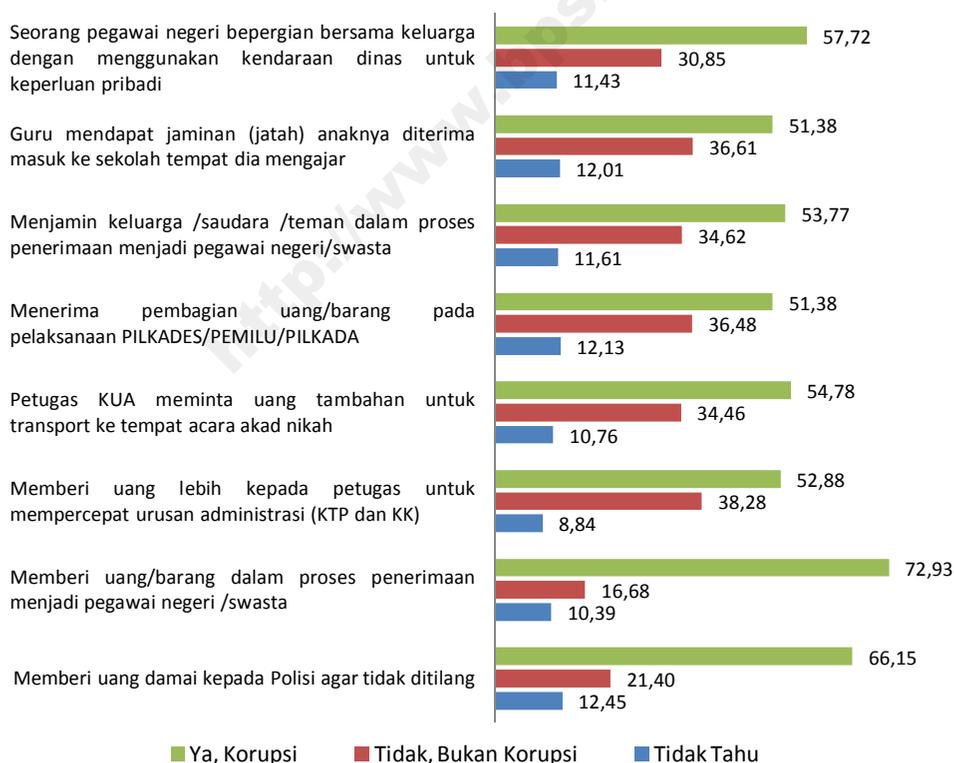
Bagian ini mencoba untuk melihat sejauh mana masyarakat Indonesia memiliki pemahaman tentang perilaku korupsi. Terdiri dari delapan kejadian yang berdasarkan definisi pada survei ini merupakan perilaku korupsi. Perilaku ini terdiri dari berbagai bentuk mulai dari suap, pemerasan dan nepotisme.

Dari delapan jenis perilaku korupsi, persentase responden yang mengetahui bahwa perilaku tersebut korupsi berkisar antara 51–73 persen. Persentase tertinggi pada perilaku memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta mencapai sekitar 73 persen. Kemudian perilaku memberi uang damai kepada polisi agar tidak ditilang mencapai sekitar 66 persen.

Sedangkan, persentase responden yang menyatakan bukan perilaku korupsi paling besar terdapat pada perilaku memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK) sebesar 38 persen. Ini menunjukkan bahwa sedikitnya sepertiga responden tidak/belum tahu perilaku korupsi.

**Gambar 23.**

**Persentase responden menurut pengetahuan responden tentang perilaku tertentu di masyarakat sebagai perilaku korupsi atau bukan perilaku korupsi**



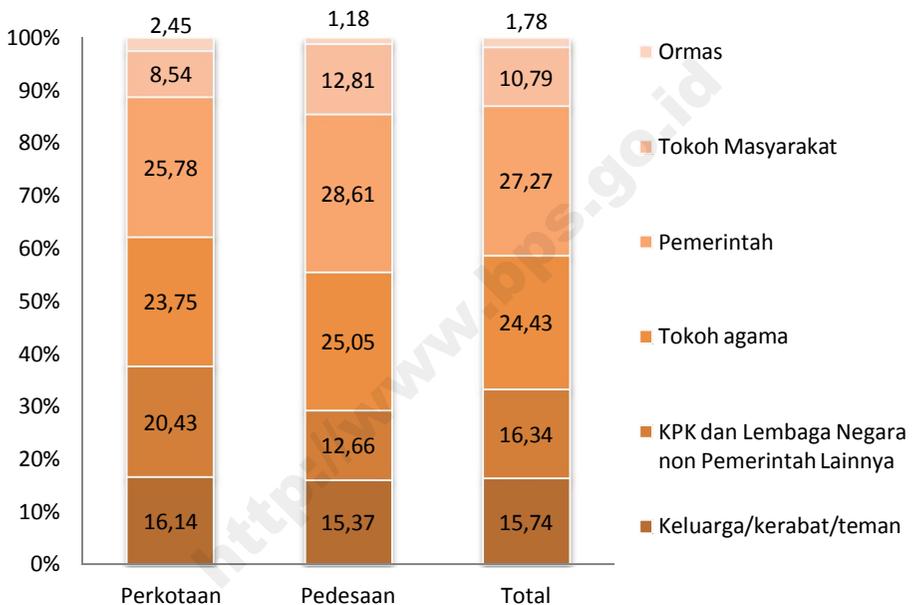
### 2.4. Media Sosialisasi Pengetahuan Anti Korupsi

IV. PERILAKU ANTI KORUPSI

Pendapat responden terkait seberapa sering mereka mendapatkan pengetahuan tentang anti korupsi dari berbagai sumber informasi dan jenis media. Efektivitas sumber informasi pengetahuan anti korupsi memiliki peranan yang penting dalam memastikan strategi komunikasi

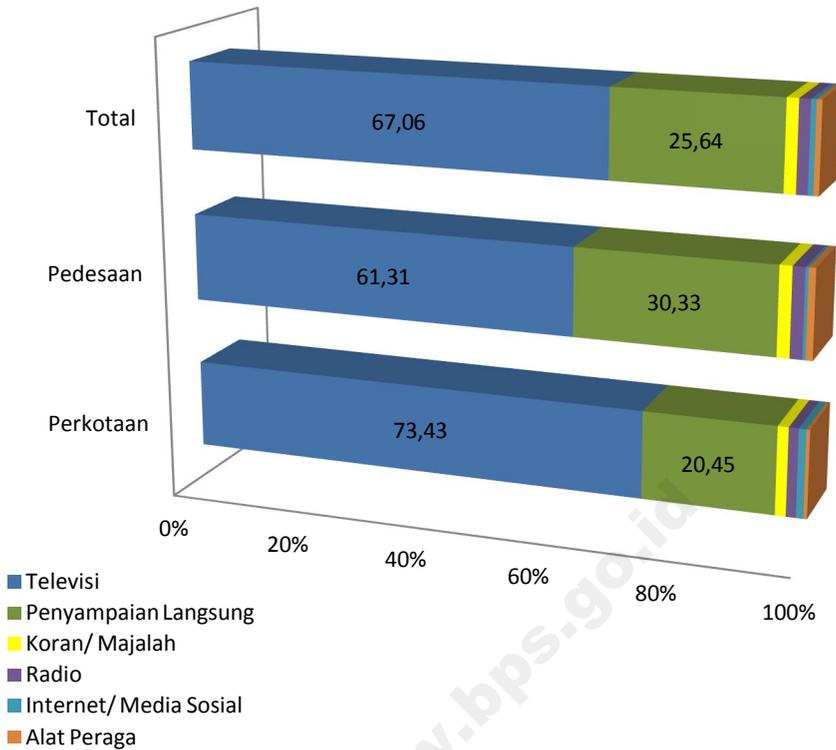
Sekitar 27 persen responden menilai pemerintah merupakan sumber informasi yang paling efektif (mudah diterima, dapat membawa hasil, berguna) dalam memberikan pengetahuan anti korupsi. Kemudian sumber informasi lain yang menurut responden paling efektif berturut-turut adalah tokoh agama (24 persen) dan KPK dan lembaga non pemerintah lainnya (16 persen).

**Gambar 24.**  
Pendapat responden menurut sumber informasi yang dinilai responden paling efektif dalam memberikan pengetahuan anti korupsi



Proses penyampaian informasi/pengetahuan anti korupsi memiliki efektivitas yang berbeda tergantung dari jenis mediana. Sekitar 67 persen responden menilai televisi merupakan jenis media yang paling efektif dalam memberikan pengetahuan anti korupsi. Kemudian peringkat kedua media yang menurut responden paling efektif (mudah diterima, dapat membawa hasil, berguna) adalah dengan penyampaian secara langsung dengan tatap muka (pidato, khutbah, nasehat, dsb) sekitar 26 persen.

**Gambar 25.**  
Pendapat responden menurut jenis media yang dinilai responden paling efektif dalam memberikan pengetahuan anti korupsi



<http://www.bps.go.id>

## LAMPIRAN

## Lampiran 1 : Kuesioner SPAK12.K



REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PUSAT STATISTIK

SPAK 2012

SPAK12.K

RAHASIA

I. PENGENALAN TEMPAT			
101	Provinsi		<input type="text"/>
102	Kabupaten/Kota *)		<input type="text"/>
103	Kecamatan		<input type="text"/>
104	Desa/Kelurahan *)		<input type="text"/>
105	Klasifikasi Desa/Kelurahan	1. Perkotaan      2. Pedesaan	<input type="checkbox"/>
106	Nomor Blok Sensus		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> B
107	Nomor Kode Sampel		<input type="text"/>
108	Nomor Urut Rumah Tangga Sampel		<input type="text"/>

\*) Coret yang tidak perlu

II. KETERANGAN PETUGAS DAN PEMILIHAN RESPONDEN			
Uraian		Pencacah	Pengawas/Pemeriksa
201	Nama dan Tanda Tangan	.....	.....
202	Tanggal	Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> Bulan <input type="text"/> <input type="text"/>	Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> Bulan <input type="text"/> <input type="text"/>

DAFTAR KEPALA RUMAH TANGGA DAN ISTRISUAMI										
No. Urut	Nama Kepala Rumah Tangga dan Istri/Suami	Hubungan dengan KRT		Jenis Kelamin		Umur (tahun)		Beri tanda (√) jika		No urut ARTeligible
		1. KRT	2. Istri/suami	1.Lk	2.Pr	(6)	(7)	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>			
2		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>			
3		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>			
4		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>			

TABEL KISH										
Jumlah ART eligible	Nomor Urut Sampel Rumah Tangga									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0	WAWANCARA BERAKHIR									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
3	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2

III. KETERANGAN UMUM RESPONDEN			
301	Nama responden		
302	Hubungan dengan KRT	1. KRT    2. Suami/Istri	<input type="checkbox"/>
303	Jenis kelamin	1. Laki-laki      2. Perempuan	<input type="checkbox"/>
304	Umur (tahun)		<input type="text"/>
305	Status perkawinan	1. Tidak Kawin    2. Kawin    3. Cerai Hidup    4. Cerai Mati	<input type="checkbox"/>
306	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	1. Tidak pernah sekolah    5. SMA/ sederajat    8. S2/S3 2. SD/ sederajat    6. DI/ DII/ DIII 3. SMP/ sederajat    7. DI/ S1	<input type="checkbox"/>

Survei Perilaku Anti Korupsi 2012

III. KETERANGAN UMUM RESPONDEN (Lanjutan)				
307	Apakah bekerja atau berusaha selama <b>seminggu terakhir</b> ?	1.Ya →R.309	2.Tidak	<input type="checkbox"/>
308	Apakah mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja selama <b>seminggu terakhir</b> ?	1.Ya	2.Tidak →R311	<input type="checkbox"/>
309	Lapangan usaha/bidang pekerjaan utama dari tempat bekerja selama <b>seminggu terakhir</b> :	1. Pertanian/Perkebunan 2. Pertambangan 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas, dan Air Minum 5. Konstruksi	6. Perdagangan 7. Angkutan/Pergudangan/Komunikasi 8. Lembaga Keuangan 9. Jasa Kemasyarakatan 0. Lainnya	<input type="checkbox"/>
310	Status dalam pekerjaan utama selama <b>seminggu terakhir</b>	1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu bunuh tidak dibayar 3. Berusaha dibantu bunuh dibayar 4. Karyawan/pegawai swasta 5. Pegawai Negeri Sipil	6. TNI/POLRI 7. Pegawai BUMD/BUMN 8. Pekerja bebas 9. Pekerja tidak dibayar	<input type="checkbox"/>
311	Rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan	1. < Rp 1 Juta 2. Rp 1 Juta – 2,9 Juta	3. Rp 3 Juta – 5,9 Juta 4. Rp 6 Juta – 9,9 Juta	5. Rp10 Juta – Rp 14,9 Juta 6. ≥ Rp 15 Juta

IV. PENDAPAT TERHADAP KEBIASAAN DI MASYARAKAT						
Rincian 401 s.d. 420: Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang :						
		Sangat Wajar	Wajar	Kurang Wajar	Tidak Wajar	Kode Pengolahan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Keluarga</b>						
401	Sikap istri yang menerima uang pemberian suami diluar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
402	Seorang Pegawai Negeri bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
403	Orang tua mengajak anaknya dalam kampanye PILKADA/PEMILU demi mendapatkan uang yang lebih banyak	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
404	Seseorang mengetahui saudaranya mengambil uang orang tuanya tetapi tidak melaporkannya	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
<b>Komunitas</b>						
405	Memberi uang/barang kepada tokoh adat/agama/masyarakat ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian, dsb)	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
406	Memberi uang/barang kepada tokoh adat/agama/masyarakat ketika menjelang hari raya keagamaan	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
407	Memberi uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian, dsb)	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
408	Memberi uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika menjelang hari raya keagamaan	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
<b>Publik</b>						
409	Demi mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan, seseorang menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri/swasta	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
410	Memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
411	Memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK)	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
412	Memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
413	Pelanggar lalu lintas yang memberi uang damai kepada Polisi	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
414	Petugas KUA meminta uang tambahan untuk transpor ke tempat acara akad nikah	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
415	Guru mendapat jaminan (jatah) anaknya diterima masuk ke sekolah tempat dia mengajar	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
416	Guru meminta uang/barang dari orang tua murid ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
417	Memberi uang/barang kepada pihak sekolah agar anaknya dapat diterima di sekolah tersebut	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
418	Pegawai melakukan pekerjaan/usaha sampingan di luar tugasnya pada saat jam kerja	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
419	Membagikan uang/barang ke calon pemilih pada PILKADES/PILKADA/PEMILU	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>
420	Mengharapkan pembagian uang/barang pada PILKADES/PILKADA/PEMILU	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>

**V. PENGALAMAN BERHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN PUBLIK**

No.	Apakah Bapak/ibu pernah berhubungan dengan petugas untuk layanan publik berikut <b>selama 12 bulan terakhir</b> ?	1. Ya, sendiri 2. Ya, dengan perantara 3. Tidak	Jika Kolom (3) berkode 1																		
			Apakah Bapak/ibu mengetahui prosedur dan biaya resmi yang berlaku? 1. Ya 2. Tidak	Seberapa sering Bapak/ibu mengeluarkan uang/barang melebihi ketentuan? 1. Sangat Sering 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak pernah 9. Biaya sesuai ketentuan (STOP)	Mengapa Bapak/ibu tidak pernah mengeluarkan uang/barang melebihi ketentuan? (STOP) (Kode)	Kapan pengeluaran uang/ barang dilakukan? (Kode)	Apa bentuk pengeluaran yang diberikan? (Kode)	Bagaimana Bapak/ibu mengetahui bahwa harus mengeluarkan uang/barang melebihi ketentuan? (jika berkode 3 atau 4 → kol. (11)) (Kode)	Bagaimana tanggapan Bapak/ibu ketika diminta uang/ barang melebihi ketentuan? (Kode)	Apa tujuan Bapak/ibu memberi uang/ barang melebihi ketentuan? (Kode)	Apakah Bapak/ibu melaporkan kejadian tersebut? 1. Ya 2. Tidak → kol.15	Kemana Bapak/ibu melapor? (yang paling utama) (Kode)	Mengapa Bapak/ibu melapor? (STOP) (Kode)	Mengapa Bapak/ibu tidak melapor? (STOP) (Kode)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)							
501	Pengurus RT/RW (misalnya dalam mengurus surat pengantar KTP, KK, SKTM, dll)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
502	Petugas Kantor Desa/Kelurahan dan Kecamatan (misalnya dalam mengurus KTP, KK, SKTM, dll)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
503	Petugas Polisi dan Administrasi (misal mengurus SIM, STNK, SKCK, dan pelaporan kehilangan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
504	Petugas PLN (misalnya dalam mendapatkan pemasangan, layanan gangguan listrik)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
505	Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas (misalnya dalam menunggu antrian rawat jalan dan mendapat kamar rawat inap)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
506	Guru/Kepala Sekolah (misalnya dalam proses penerimaan masuk sekolah negeri)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
507	Petugas Lembaga Peradilan (misalnya dalam urusan peradilan tilang dan umum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
508	Petugas KUA (misalnya dalam mengurus pernikahan/perceraian)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
509	Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (misalnya dalam membuat akta kelahiran/surat nikah)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
510	Petugas BPN (misalnya dalam pengurusan sertifikat atau pengukuran/pemetaan tanah)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<p><b>Pilihan jawaban</b></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Kolom (6):</b> 1. Tidak memiliki uang lebih 2. Menolak praktik suap 3. Tidak ada manfaatnya 4. Takut melanggar hukum</td> <td><b>Kolom (7)</b> 1. Sebelum pelayanan 2. Pada saat pelayanan 3. Sesudah pelayanan 4. Sebelum dan sesudah pelayanan</td> <td><b>Kolom (9)</b> 1. Diminta langsung oleh petugas 2. Diminta oleh pihak ketiga 3. Hal yang lumrah 4. Tidak ada yang meminta</td> <td><b>Kolom (11)</b> 1. Mempercepat proses pengurusan 2. Mendapatkan pelayanan yang lebih baik 3. Demi menjaga hubungan baik 4. Sebagai tanda terima kasih</td> <td><b>Kolom (13)</b> 1. Polisi 2. Kejaksaan 3. KPK 4. Atasan petugas ybs 5. LSM/Omas 6. DPR/DPRD 7. Komisi Pelayanan Publik (Ombudsman) 8. Media massa 9. Lainnya (pemuka adat, media sosial)</td> <td><b>Kolom (14)</b> 1. Marah/musik akan keadaan 2. Merasa dirugikan/diskriminasi 3. Memberantas suap 4. Ingin memperbaiki keadaan 5. Percaya bahwa laporan akan dilakuklanjuti 6. Adanya perlindungan bagi pelapor</td> <td><b>Kolom (15)</b> 1. Marah, tidak akan dilakuklanjuti 2. Tidak tahu cara dan kepada siapa harus melapor 3. Proses rumit dan lama 4. Takut dipersulit atau dilaporkan balik 5. Hal lumrah, hanya sebagai ucapan terima kasih 6. Saya juga menerima keuntungan dari hal tersebut</td> </tr> </table>															<b>Kolom (6):</b> 1. Tidak memiliki uang lebih 2. Menolak praktik suap 3. Tidak ada manfaatnya 4. Takut melanggar hukum	<b>Kolom (7)</b> 1. Sebelum pelayanan 2. Pada saat pelayanan 3. Sesudah pelayanan 4. Sebelum dan sesudah pelayanan	<b>Kolom (9)</b> 1. Diminta langsung oleh petugas 2. Diminta oleh pihak ketiga 3. Hal yang lumrah 4. Tidak ada yang meminta	<b>Kolom (11)</b> 1. Mempercepat proses pengurusan 2. Mendapatkan pelayanan yang lebih baik 3. Demi menjaga hubungan baik 4. Sebagai tanda terima kasih	<b>Kolom (13)</b> 1. Polisi 2. Kejaksaan 3. KPK 4. Atasan petugas ybs 5. LSM/Omas 6. DPR/DPRD 7. Komisi Pelayanan Publik (Ombudsman) 8. Media massa 9. Lainnya (pemuka adat, media sosial)	<b>Kolom (14)</b> 1. Marah/musik akan keadaan 2. Merasa dirugikan/diskriminasi 3. Memberantas suap 4. Ingin memperbaiki keadaan 5. Percaya bahwa laporan akan dilakuklanjuti 6. Adanya perlindungan bagi pelapor	<b>Kolom (15)</b> 1. Marah, tidak akan dilakuklanjuti 2. Tidak tahu cara dan kepada siapa harus melapor 3. Proses rumit dan lama 4. Takut dipersulit atau dilaporkan balik 5. Hal lumrah, hanya sebagai ucapan terima kasih 6. Saya juga menerima keuntungan dari hal tersebut
<b>Kolom (6):</b> 1. Tidak memiliki uang lebih 2. Menolak praktik suap 3. Tidak ada manfaatnya 4. Takut melanggar hukum	<b>Kolom (7)</b> 1. Sebelum pelayanan 2. Pada saat pelayanan 3. Sesudah pelayanan 4. Sebelum dan sesudah pelayanan	<b>Kolom (9)</b> 1. Diminta langsung oleh petugas 2. Diminta oleh pihak ketiga 3. Hal yang lumrah 4. Tidak ada yang meminta	<b>Kolom (11)</b> 1. Mempercepat proses pengurusan 2. Mendapatkan pelayanan yang lebih baik 3. Demi menjaga hubungan baik 4. Sebagai tanda terima kasih	<b>Kolom (13)</b> 1. Polisi 2. Kejaksaan 3. KPK 4. Atasan petugas ybs 5. LSM/Omas 6. DPR/DPRD 7. Komisi Pelayanan Publik (Ombudsman) 8. Media massa 9. Lainnya (pemuka adat, media sosial)	<b>Kolom (14)</b> 1. Marah/musik akan keadaan 2. Merasa dirugikan/diskriminasi 3. Memberantas suap 4. Ingin memperbaiki keadaan 5. Percaya bahwa laporan akan dilakuklanjuti 6. Adanya perlindungan bagi pelapor	<b>Kolom (15)</b> 1. Marah, tidak akan dilakuklanjuti 2. Tidak tahu cara dan kepada siapa harus melapor 3. Proses rumit dan lama 4. Takut dipersulit atau dilaporkan balik 5. Hal lumrah, hanya sebagai ucapan terima kasih 6. Saya juga menerima keuntungan dari hal tersebut															

VI. PENGALAMAN LAINNYA		
Rincian 601 s.d. 605 : Pengalaman Responden	1. Ya 2. Tidak 3. Tidak ingat 9. Tidak relevan	Jika Kolom 2 berkode 1, Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dalam situasi tersebut? 1. Menerima 2. Menolak dengan terpaksa 3. Menolak dengan halus 4. Menolak dengan tegas
Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami peristiwa berikut selama 12 bulan terakhir?	Pindah ke jincian berikutnya	
(1)	(2)	(3)
601 Pernahkah Bapak/Ibu ditawarkan uang/barang untuk memilih kandidat tertentu dalam PILKADES, PILKADA, atau PEMILU?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
602 Pernahkah Bapak/Ibu ditawarkan oleh seseorang untuk memasukkan anggota rumah tangga agar diterima menjadi pegawai negeri/swasta dengan keharusan membayar sejumlah uang tertentu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
603 Pernahkah Bapak/Ibu ditawarkan bantuan oleh saudara/teman agar anggota rumah tangga diterima menjadi pegawai negeri/swasta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
604 Pernahkah Bapak/Ibu ditawarkan bantuan oleh saudara/teman agar anggota rumah tangga lolos seleksi penerimaan masuk sekolah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
605 Pernahkah Bapak/Ibu ditawarkan untuk membayar uang damai saat ditilang oleh petugas polisi lalu lintas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VII. PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PERILAKU TERTENTU		
Rincian 701 s.d. 708 :	1.Ya 2.Tidak 9.Tidak Tahu	
Menurut pemahaman dan pengetahuan Bapak/Ibu, perilaku berikut ini termasuk perilaku korupsi atau bukan?		
(1)	(2)	
701 Memberi uang damai kepada Polisi agar tidak ditilang	<input type="checkbox"/>	
702 Memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta	<input type="checkbox"/>	
703 Memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK)	<input type="checkbox"/>	
704 Petugas KUA meminta uang tambahan untuk transport ke tempat acara akad nikah	<input type="checkbox"/>	
705 Menerima pembagian uang/barang pada pelaksanaan PILKADES/PILKADA/PEMILU	<input type="checkbox"/>	
706 Menjamin keluarga/saudara/teman dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta	<input type="checkbox"/>	
707 Guru mendapat jaminan (jatah) anaknya diterima masuk ke sekolah tempat dia mengajar	<input type="checkbox"/>	
708 Seorang pegawai negeri bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi	<input type="checkbox"/>	

VIII. SUMBER INFORMASI TENTANG PENGETAHUAN ANTI KORUPSI						
Rincian 801 s.d. 806 :	Sangat Sering	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Tidak Tahu (Jangan Dibacakan)	Kode Pengolahan
Seberapa sering Bapak/Ibu mendapatkan pengetahuan tentang anti korupsi dari beberapa sumber berikut selama 12 bulan terakhir :	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
801 Keluarga/kerabat/teman	1	2	3	4	0	<input type="checkbox"/>
802 Tokoh agama	1	2	3	4	0	<input type="checkbox"/>
803 Tokoh masyarakat	1	2	3	4	0	<input type="checkbox"/>
804 Organisasi kemasyarakatan/LSM	1	2	3	4	0	<input type="checkbox"/>
805 Pemerintah	1	2	3	4	0	<input type="checkbox"/>
806 KPK dan Lembaga Negara Non Pemerintah Lainnya	1	2	3	4	0	<input type="checkbox"/>
807 Dari seluruh sumber tersebut mana yang menurut pendapat Bapak/Ibu paling EFEKTIF (mudah diterima) dalam memberikan pengetahuan tentang ANTI KORUPSI : 1. Keluarga/kerabat/teman 2. Tokoh agama 3. Tokoh Masyarakat 4. Organisasi Kemasyarakatan 5. Pemerintah 6. KPK dan Lembaga Negara Non Pemerintah Lainnya						<input type="checkbox"/>
Rincian 808 s.d. 813 :	Sangat Sering	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Tidak Tahu (Jangan Dibacakan)	Kode Pengolahan
Seberapa sering Bapak/Ibu mendapatkan pengetahuan tentang anti korupsi dari beberapa media berikut selama 12 bulan terakhir :	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
808 Televisi	1	2	3	4	0	<input type="checkbox"/>
809 Radio	1	2	3	4	0	<input type="checkbox"/>
810 Koran/majalah	1	2	3	4	0	<input type="checkbox"/>
811 Internet/media sosial	1	2	3	4	0	<input type="checkbox"/>
812 Alat peraga (spanduk, pamflet, brosur, stiker, dsb)	1	2	3	4	0	<input type="checkbox"/>
813 Penyampaian secara langsung (pidato, khutbah, nasehat, dsb)	1	2	3	4	0	<input type="checkbox"/>
814 Dari seluruh media tersebut mana yang menurut pendapat Bapak/Ibu paling EFEKTIF (mudah diterima) dalam memberikan pengetahuan tentang ANTI KORUPSI : 1. Televisi 2. Radio 3. Koran/majalah 4. Internet/media sosial 5. Alat peraga 6. Penyampaian secara langsung						<input type="checkbox"/>

## Lampiran 2 : Indeks Perilaku Anti Korupsi

Karakteristik Responden	Jumlah (Persentase) Responden		IPAK
<b>Klasifikasi Wilayah:</b>			
Perkotaan	6.181	(69,4%)	3,66
Perdesaan	2.731	(30,6%)	3,46
<b>Jenis Kelamin:</b>			
Laki-Laki	4.028	(45,2%)	3,59
Perempuan	4.884	(54,8%)	3,53
<b>Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT):</b>			
Kepala Rumah Tangga	5.325	(59,8%)	3,56
Istri/Suami	3.587	(40,2%)	3,54
<b>Umur (Tahun):</b>			
Kurang dari 40	3.060	(34,3%)	3,57
40 sampai 59	4.294	(48,2%)	3,58
60 atau lebih	1.558	(17,5%)	3,45
<b>Status Perkawinan:</b>			
Tidak Kawin	229	(2,6%)	3,61
Kawin	7.299	(81,9%)	3,56
Cerai Hidup	253	(2,8%)	3,48
Cerai Mati	1.131	(12,7%)	3,49
<b>Pendidikan Tertinggi:</b>			
SLTP ke bawah	6.085	(68,3)	3,47
SLTA	2.031	(22,8%)	3,78
Diatas SLTA	796	(8,9%)	3,93

**Lampiran 3 : Foto-Foto Workshop Instruktur Nasional**



Pembukaan oleh Kepala Badan Pusat Statistik



Sambutan oleh Ketua Panitia Penyelenggara,  
Direktur Statistik Ketahanan Sosial



Foto Bersama 1



Foto Bersama 2



Suasana kelas pada saat sesi materi Workshop Instruktur Nasional



Ujian Seleksi Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2012



Suasana Diskusi Master Intama dan Intama

Lampiran 4 : Foto-Foto Pencacahan



*Sleman, DIY*



*Pekanbaru, Riau*



*Kebumen, Jawa Tengah*



*Lampung*



*Kota Bogor, Jawa Barat*



*Kota Bogor, Jawa Barat*



*Kota Ambon, Maluku*



*Mencacah di RS (Lampung)*





# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik**

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4. Fax.: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: [bpsdq@bps.go.id](mailto:bpsdq@bps.go.id)